

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Ilmuwan sosial yang memberikan makna pemberdayaan memiliki rumusan yang berbeda dalam situasi dan bidang studi yang berbeda. Jadi tidak ada definisi yang jelas tentang konsep ini. Namun, dalam arti yang lebih luas, pemberdayaan seringkali sama dengan mendapatkan akses ke sumber daya, fitur, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang arti pemberdayaan, kita perlu mempertimbangkan beberapa pendapat para ilmuwan yang bekerja dalam pemberdayaan masyarakat. Robinson (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses personal dan sosial. Pembebasan kemampuan individu, kemampuan, kreativitas, kebebasan bertindak. Di sisi lain, Ife (2005) berpendapat bahwa pemberdayaan mengacu pada istilah "pemberdayaan". Ini berarti memberi kekuatan, memberi kekuatan.¹⁷

Payne (2007) menemukan bahwa pemberdayaan pada dasarnya memperoleh kekuatan, kekuatan, dan kemampuan untuk membuat keputusan dan tindakan yang harus dilakukan klien, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial atas tindakan mereka. Ini menjelaskan bahwa itu

¹⁷ Ife, Jim. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman Australia

dimaksudkan untuk membantu Anda masuk.¹⁸. Orang yang mencapai tujuan kolektif diberdayakan oleh kemandirian. Ini juga "wajib" bahwa Anda dapat lebih diberdayakan oleh upaya Anda dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan Anda tanpa menggunakan bantuan hubungan eksternal.

2.1.2 Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (2006), “Ada dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan. Pertama, kami menekankan pada proses memberi atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat untuk memberdayakan individu. Proses pemberdayaan, dimana trend pertama dapat dikatakan trend utama dalam arti pemberdayaan, trend kedua atau kedua adalah mendorong individu untuk memiliki kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog. Tekankan proses menginspirasi, mendorong, atau memotivasi Sumardjo (2009) fitur warga yang diberdayakan:¹⁹:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding

¹⁸ Patton, J R, Payne, James S, and Smith, Mary Beirne. 2007. *Mental Retardation 2 nd Edition* USA: Charles E. Merrill Publishing Company

¹⁹ Sumardjo. 2009. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Konflik Sosial Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Propinsi Riau*. Riau

4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah mengetahui, memahami, memahami, memiliki kesempatan, memanfaatkan peluang, memiliki energi, bertindak bersama, Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dia adalah orang yang mengetahui pilihan, membuat keputusan, mengambil risiko, dan mencari dan menangkap informasi. Anda dapat bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang mewujudkan komunitas dengan karakteristik yang Anda harapkan harus terus dilaksanakan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab²⁰.

2.1.3 Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama program pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat diberdayakan atau memiliki kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan. Kekuatan masalah terlihat pada aspek fisik dan material penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan upaya bersama²¹.

²⁰ Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga

²¹ Wahab Solichin Abdul. 2008, *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Ed. 2. Cet. 6. Bumi Aksara: Jakarta

Berkaitan dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk dan mandiri dari individu dan komunitas. Kemandirian ini meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak dan mengontrol apa yang dilakukannya. Kemandirian masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat mengalami dan memiliki kemampuan untuk berpikir, menentukan, dan melaksanakan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menggunakan kekuatan / kemampuan yang dimilikinya²². Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, afinitas, psikomotorik, emosional, dan sumber daya fisik / materi lainnya. Keadaan kognitif pada dasarnya adalah keterampilan berpikir yang didasarkan pada pengetahuan dan wawasan seseorang untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kondisi yang memprihatinkan adalah sikap perilaku masyarakat yang dibentuk dan diarahkan pada perilaku yang peka terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Keadaan emosional merupakan emosi yang dimiliki individu yang diharapkan melakukan intervensi untuk mencapai pemberdayaan sikap dan perilaku. Keterampilan psikomotorik merupakan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan.

²² Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia

2.1.4 Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia sangat relevan dengan paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini mengakui pentingnya kemampuan komunitas untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kemampuannya untuk melakukan pengendalian internal atas sumber daya material dan non-material.

Korten Harry Hikmat (2001: 16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada manusia. Yang pertama adalah fokus pada pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah, menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan individu dan mendorong serta mendukung upaya masyarakat untuk memecahkan masalah di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. .. Kemudian kembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi sesuai dengan prinsip sistem yang mengatur dirinya sendiri. Ketiga, mengembangkan sistem produksi dan konsumsi yang terorganisir secara lokal berdasarkan prinsip-prinsip kepemilikan dan pengelolaan daerah²³.

Namun, dalam model pembangunan yang berpusat pada manusia, pemberdayaan (empowerment) lebih penting. Model ini menganggap inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber pembangunan terpenting, dan kesejahteraan materi dan mental masyarakat sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.

²³ Hikmat, R. Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung,. Humaniora Utama Press (HUP)

Pemberdayaan membutuhkan keterlibatan pihak-pihak selain dari pihak pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dan kenyataan bahwa pihak lain tersebut adalah pemerintah yang harus benar-benar konsisten dengan program pemberdayaan berarti pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keadaan setiap orang. Untuk menahannya, ini adalah langkah yang tepat untuk membangun layer. Ini menetapkan konteks "kontrak kerja" yang mengikat masyarakat miskin dan institusi, terutama instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Batasan tersebut juga menciptakan kondisi yang menyebabkan masyarakat miskin dan pekerja sosial dapat menjalankan fungsinya masing-masing.

Strategi pemberdayaan telah disingkat menjadi 5P. Artinya, enablement, hardening, protection, support, dan maintenance, namun penulis mengkaji lima strategi ini untuk mendukung dan menopang peran penting pemerintah dalam pemberdayaan (Suharto, 2007: 218- 219)²⁴:

- a. Kemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim yang dapat secara optimal mengembangkan potensi masyarakat miskin. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari hambatan budaya dan struktural yang menghadang mereka.
- b. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan orang miskin untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan semua kapasitas dan kepercayaan masyarakat miskin untuk mendukung kemandirian.

²⁴ Suharto, Edi. 2007, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama

- c. Perlindungan: Lindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh yang kuat. Ini menghindari persaingan yang tidak seimbang (terutama yang tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah eksploitasi yang kuat oleh yang lemah. Pemberdayaan harus mengarah pada penghapusan semua jenis diskriminasi dan kontrol yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Dukungan: Memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu orang miskin menjalankan peran dan tugasnya dalam hidup mereka. Pemberdayaan harus dapat membantu melemahkan kaum miskin dan mencegah mereka jatuh ke dalam situasi dan posisi yang terpinggirkan.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan verbal berasal dari kata Daya, yang berarti energi / kekuatan, proses, metode, atau tindakan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya yang memberdayakan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran dan mengembangkan potensinya (Daniel, 2014: 25). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat secara produktif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang tinggi. Upaya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menciptakan nilai tambah setidaknya harus meningkatkan empat akses: akses ke sumber daya, akses ke teknologi, akses

ke pasar, dan akses ke permintaan. Ekonomi kerakyatan adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan kapasitas atau potensi kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, serta berpotensi bagi proses pembangunan nasional

2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan muncul sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan industri yang tidak berpihak pada mayoritas rakyat. Konsep ini dibangun dari kerangka logis menurut Darmawan (2014: 56) sebagai berikut²⁵:

1. proses pemusatan tenaga yang terbangun dari pemusatan kendali faktor produksi
2. Konsentrasi kekuatan pada faktor produksi menciptakan komunitas kerja dan komunitas dengan pengusaha marjinal
3. Kekuasaan membangun, memperkuat dan membenarkan suprastruktur atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi operasional
4. Sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan adopsi ideologi secara sistematis membentuk dua kelompok: mereka yang berkuasa dan

²⁵ Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

mereka yang cacat. Bagaimanapun, yang terjadi adalah dikotomi, masyarakat penguasa dan orang yang memerintah. Untuk pelepasan kendali dan konteks penguasaan, pelepasan harus dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dikendalikan.

2.2.3 Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat membutuhkan pola pemberdayaan yang tepat sasaran. Bentuk yang baik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang ditentukan. Selain itu, masyarakat diberdayakan oleh pemerintah untuk mengelola dananya sendiri. Hal ini membedakan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang sangat baik ini, yang dielu-elukan sebagai pendekatan yang paling dipersepsikan baik dalam struktur pemerintahan yang lebih luas maupun pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan, pada kenyataannya telah memungkinkan siapa saja untuk memberdayakan masyarakat dan benar-benar mengembangkannya. Anda perlu memikirkan tentang apa yang Anda miliki. Good Governance adalah kondisi yang membentuk proses kesejahteraan, kesetaraan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta pengelolaan timbal balik yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan pengusaha swasta.²⁶

²⁶ Mardi Yatno Hutomo. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Adiyana Press, Yogyakarta

Dalam keadaan ini, ada tiga pilar yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang perlu menjalin kemitraan yang harmonis. Tujuan yang dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan komunitas menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses untuk mengarah pada pembentukan masyarakat kognitif yang lebih baik dan untuk mencapai kemandirian masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua pendekatan, diantaranya pertama menyiapkan masyarakat menjadi wirausaha. Untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah bekerja. Memberikan pelatihan bisa menjadi persiapan yang sangat penting saat memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi wirausaha ini:

a. Memberikan bantuan motivasi moril

Untuk dapat melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua pendekatan, diantaranya pertama menyiapkan masyarakat menjadi wirausaha. Untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah bekerja. Memberikan pelatihan bisa menjadi persiapan yang sangat penting saat Anda memasuki dunia kerja. Program rukome no ko no ko no ting pengusaha adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini, setiap peserta akan memahami konsep kewirausahaan dan segala kompleksitas permasalahan yang ada. Tujuan

dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan teknis kewirausahaan dalam berbagai aspek, serta memberikan wawasan yang lebih lengkap dan nyata untuk membantu memotivasi masyarakat. Pelatihan sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih praktis dengan menguji pengelolaan praktik kehidupan wirausaha, baik oleh mereka yang berkecimpung di dunia bisnis, maupun dengan contoh-contoh spesifik yang terjadi dalam praktik bisnis. Ada. Melalui pelatihan semacam ini, disarankan untuk mencermati kiat-kiat tertentu yang harus ia lakukan dan sedapat mungkin menghindari kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausaha.

2. Permodalan

modal. Untuk bentuk. uang. adalah. Salah. 1. Elemen penting. Untuk Dunia bisnis, tapi sibuk. Itu. yang paling penting. Apakah pendanaan bank disalurkan melalui kemitraan bisnis lain untuk memperoleh dukungan finansial. Perkembangan laba yang baik jika bisnis tidak ditampilkan, seringkali bank tidak memberikan pinjaman setelah bisnis dimulai dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

Bentuk pemberdayaan. Kedua, adalah. Dengan pendidikan. Ketidaktahuan adalah akar kemiskinan, dan dengan demikian kemiskinan sebagian besar merupakan keturunan, kemiskinan jangka panjang karena orang tua miskin dan tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka, yang menambah daftar angka kemiskinan di masa depan. Berasal dari bidang pendidikan. Pemberdayaan di bidang pendidikan tersebut dapat disalurkan

dengan dua cara. Salah satunya adalah memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, yang lainnya memberikan beasiswa otomatis untuk mengurangi beban orang tua sekaligus memotivasi dan menyediakan sarana dan prasarana. Prosesnya adalah memberikan proses pembelajaran formal atau informal. , Setidaknya uang yang masuk ke pendidikan ini akan digunakan tidak hanya untuk beasiswa, tapi juga untuk perbaikan sarana dan prasarana belajar. Karena tidak mungkin menciptakan siswa berkualitas dengan peralatan yang minim.

2.3 Implementasi Program

2.3.1 Pengertian Program

Pembahasan program tidak terlepas dari sisi kebijakan. Menurut Dye (2002), kebijakan atau asas dalam hal ini pada prinsipnya merupakan kebijakan publik dan dapat diartikan sebagai “apapun yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah”. Hal ini diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dan, sebagai alat yang diciptakan oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berupa aturan umum dan / atau aturan khusus baik tertulis maupun tertulis yang mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Termasuk opsi untuk tindakan yang memaksa, melarang, dan / atau mengizinkan.

Sedangkan menurut Jones (2004) definisi program itu sendiri adalah program yang diperbolehkan untuk mencapai tujuannya. Dalam pengertian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa program merupakan gambaran dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini program pemerintah merupakan upaya untuk mencapai suatu kebijakan pemerintah tertentu. Program-program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian / Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.3.2 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udojo Wahab (2008: 59) dengan jelas menyatakan bahwa implementasi kebijakan itu penting dan lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan hanyalah impian atau rencana bagus yang akan terarsipkan dengan baik jika tidak dilaksanakan. Pada prinsipnya melaksanakan suatu kebijakan adalah bagaimana suatu kebijakan pada prinsipnya suatu kebijakan adalah suatu cara untuk mencapai tujuannya²⁷.

Mazmaniani dan Sabatier (2008: 65) dari Wahab memahami bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa suatu program dinyatakan sah atau diformalkan, dan itu adalah pelaksanaan program, atau kebijakan yang disahkan. Ini menyatakan bahwa itu berfokus pada acara dan kegiatan yang memiliki pedoman. Negara yang mencakup upaya pengelolaan dan dampak sosial²⁸

²⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

²⁸ Abdul Wahab Solichin. 2008, *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Ed. 2. Cet. 6. Bumi Aksara: Jakarta

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi pelaksanaan program adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Bagian terpenting dari proses kebijakan publik adalah proses pelaksanaan program, dan kebijakan yang dikatakan berhasil mencapai tujuannya adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (output) yang dicapai dan proses tersebut. Tujuan yang ingin dicapai.

2.3.3 Konsep Implementasi Program

Pada prinsipnya pelaksanaan program adalah cara suatu program mencapai tujuannya. Lester dan Stewart, dikutip oleh Winarno, menguraikan pelaksanaan program sebagai berikut: “Pelaksanaan program secara luas dipandang sebagai alat manajemen hukum yang menyatukan pemangku kepentingan, organisasi, prosedur dan teknologi yang berbeda untuk menerapkan kebijakan guna mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan.”²⁹”

Oleh karena itu pelaksanaan program merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan kebijakan. Namun, saat menulis program, pemerintah harus menilai dulu apakah kebijakan berdampak negatif bagi masyarakat.

²⁹ Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Sudah jelas bahwa kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat dan merugikan masyarakat.

Nugroho (2014: 433) memahami implementasi program sebagai "cara kebijakan untuk mencapai tujuannya." Proses implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dalam dua langkah. Artinya, langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan program turunan atau turunan kebijakan publik.³⁰

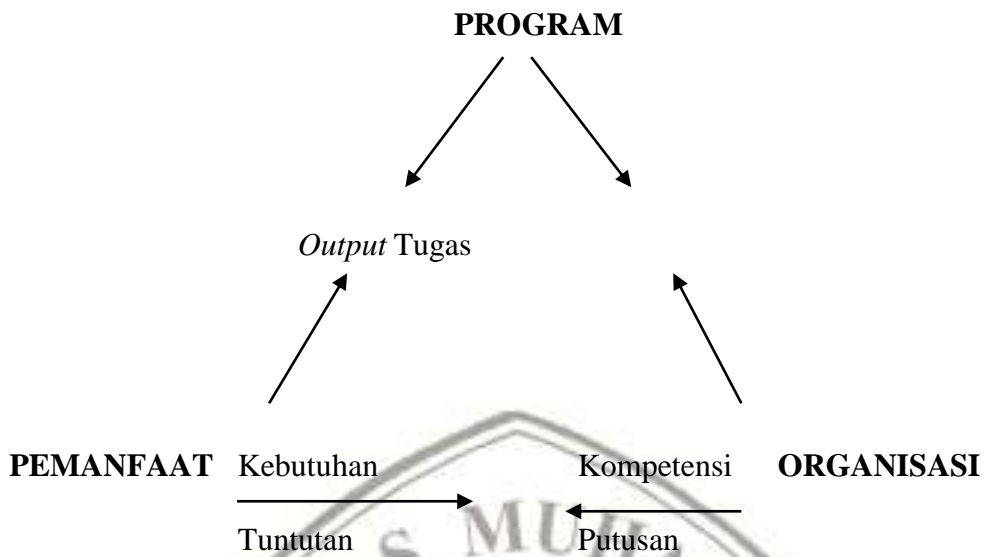
Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu³¹:

- a. Sebuah. Struktur organisasi yang jelas diperlukan saat menjalankan program pengorganisasian. Ini akan menghasilkan staf pelaksana yang terdiri dari personel yang kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi Pelaksana harus mampu melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis dan implementasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Routing yang jelas harus dibuat agar program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertentangan dengan aplikasi atau program aplikasi lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

³⁰ Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

³¹ Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. *Tesis. Program magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*



Gambar 2.1 Model Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menggambarkan model ini memiliki tiga elemen dalam pelaksanaan program: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Mr Cotain mengatakan program akan berhasil jika implementasi program memiliki tiga elemen yang berdampingan. Pertama, kesesuaian program dan penerima manfaat, yaitu apa yang ditawarkan program dan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (penerima manfaat). Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pengguna dan organisasi pelaksana, yaitu persyaratan yang ditentukan oleh organisasi untuk memungkinkan kelompok sasaran program melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk mendapatkan keluaran program.³²

³² Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi. Aksara

Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Cotain, terlihat bahwa jika ketiga elemen implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai, maka kinerja program tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal ini karena jika keluaran program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas keluaran tersebut tidak tersedia. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diminta oleh program, maka organisasi tidak akan mampu menyediakan output program dengan baik. Atau, jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana program, kelompok sasaran tidak akan mendapatkan keluaran program. Oleh karena itu, kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam Maryono (2010: 43) yang berjudul *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni³³:

- a. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
- b. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan ?
- c. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut ?

³³ Maryono.2010. *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*. Yogyakarta: Magnum pustaka

- d. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?
- e. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
- f. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Kesimpulannya, program ini merupakan interpretasi dari kebijakan pemerintah yang mencakup seperangkat instruksi yang dirancang untuk memperbaiki masalah yang berkembang. Sebuah program diperlukan untuk menegakkan kebijakan tersebut. Program pemerintah yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

2.3.4 Pendekatan-Pendekatan Implementasi

Menurut Wahab (2008:110) untuk mengimplementasikan program dapat digunakan beberapa pendekatan antar lain³⁴:

a. Pendekatan Struktural (*struktural Approach*)

Struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula. Disini tidak lagi menyamaratakan secara universal antar organisasi satu dengan organisasi lain. Terdapat perbedaan-perbedaan karakteristik antara organisasi satu dengan yang lain.

b. Pendekatan prosedural dan Manajerial (*procedural and managerial approach*)

³⁴ Wahab Solichin Abdul. 2008, *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Ed. 2. Cet. 6. Bumi Aksara: Jakarta

Pada pendekatan ini implementasi kebijakan akan mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memberikan secara tepat jangka waktu penyesuaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitoring setiap peluang waktu yang ada bagi penyesuaian tugas dalam jaringan kerja.

c. Pendekatan Kepribadian

Pendekatan kepribadian merupakan pendekatan yang lebih terfokus pada karakteristik perilaku masyarakat karena kebijakan yang seringkali disangkal. Penolakan ini mungkin karena kurangnya pemahaman tentang kebijaksanaan yang dibuat. Oleh karena itu, alasan, tujuan, sasaran dan musyawarah yang dibutuhkan harus dijelaskan sejak awal untuk meningkatkan pemahaman dan pada akhirnya mendukung keberhasilan kebijakan..

d. Pendekatan Politik (*Polotical Approach*)

Pendekatan politik adalah bahwa keberhasilan dari suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok berpengaruh (koalisi dari kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain pendekatan ini adalah mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya di dalam lingkungan organisasi.

2.3.5 Proses Implementasi Program

Proses implementasi suatu kebijakan publik menurut Widodo (2013:90-94) yang mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*To Organized*), dan tahap aplikasi (*application*)³⁵.

a. Tahapan Interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan transformasi dari kebijakan abstrak menjadi kebijakan yang lebih operasional secara teknis. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (kebijakan strategis) diubah menjadi kebijakan manajemen (kebijakan manajemen), dan kebijakan manajemen diubah menjadi kebijakan teknologi operasional (kebijakan operasi). Kebijakan umum atau strategis dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama antara DPRD dan Badan Pemerintahan (Pemerintah Daerah). Kebijakan pengelolaan diperjelas dalam bentuk perintah dari walikota setempat (presiden / walikota), dan kebijakan teknis operasional dituangkan dalam bentuk kebijakan pengelola kantor, pengelola lembaga atau pengelola kantor sebagai faktor pelaksana teknis pemerintah daerah. Ini ditentukan dalam bentuk kebijakan teknologi operasi.

Kegiatan Policy Interpretation tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang abstrak menjadi kebijakan yang lebih operasional, tetapi juga mengkomunikasikan kebijakan (*outreach*) sehingga seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat memahami arah, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Aktivitas terus berlanjut. Kebijakan ini harus dikomunikasikan atau

³⁵ Widodo. 2013, *Analisa Kebijakan Publik*. Banyuwangi : Bayumedia Publishing

disosialisasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pihak yang terlibat dalam kebijakan ini dapat berpartisipasi. Mereka tidak hanya menyadari dan memahami arah, sasaran, dan tujuan kebijakan, tetapi yang lebih penting, mereka dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahapan pengorganisasian ini diarahkan pada proses pengaturan kegiatan dan penentuan siapa penegak kebijakan (lembaga mana yang memutuskan untuk menegakkannya dan siapa aktornya). Penganggaran (berapa banyak anggaran yang dibutuhkan, di mana, bagaimana digunakan, dan seberapa dapat dipertanggungjawabkan). Menentukan infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan menentukan prosedur kerja. Serta mengatur implementasi kebijakan, termasuk menetapkan pola kepemimpinan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan..

c. Pelaksana Kebijakan (*Policy Implementor*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementors*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sektor swasta
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar penetapan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

d. Standar Prosedural Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap menerapkan suatu kebijakan, Anda harus menetapkan prosedur operasi standar (SOP) sebagai pedoman, pedoman, pedoman, dan acuan untuk memahami apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa yang menjadi sasaran, dan konsekuensi penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat digunakan untuk mencegah terjadinya perbedaan sikap dan perilaku saat menghadapi masalah saat melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, semua kebijakan yang dibuat harus berupa prosedur standar berupa operasi tetap (Protab) atau prosedur operasi standar atau standar pelayanan minimum (SPM)..

e. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah menentukan perilaku kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP), langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah dan sumber anggaran serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tentu saja, apakah Anda menerapkan kebijakan berdasarkan anggaran Anda atau tidak bergantung pada jenis dan jenis kebijakan yang sebenarnya Anda terapkan. Namun sumber anggaran setidaknya bisa ditentukan oleh pemerintah pusat (APBN), APBD, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Demikian pula, jenis,

jenis, dan ukuran peralatan yang diperlukan berbeda-beda, bergantung pada jenis dan jenis kebijakan yang Anda terapkan. Namun yang lebih penting untuk diketahui dan ditekankan adalah bahwa implementasi kebijakan harus didukung dengan peralatan yang memadai. Peralatan yang tidak memadai dan tepat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

f. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Dalam hal ini, manajemen implementasi kebijakan difokuskan pada pembentukan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Jika banyak instansi (pelaku kebijakan) terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka harus jelas bahwa pola kepemimpinan yang digunakan adalah pola yang kongruen atau ada satu instansi yang ditunjuk sebagai koordinatornya. Ketika salah satu aktor kebijakan ditunjuk sebagai koordinator, otoritas yang terkait erat dengan pelaksana kebijakan biasanya diberi peran sebagai koordinator dalam implementasi kebijakan..

g. Penetapan Jadwal Kegiatan

Setidaknya dalam hal "proses implementasi kebijakan", perlu dibuat jadwal implementasi kebijakan untuk kinerja implementasi kebijakan yang baik. Jadwal penegakan kebijakan harus diikuti secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,

khususnya dari segi dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Anda perlu meninjau semua implementasi kebijakan dan jadwal implementasi kebijakan akan dibuat.

h. Tahap Aplikasi (*Aplication*)

Tahap penegakan merupakan implementasi aktual dari rencana proses penegakan kebijakan. Tahapan aplikasi merupakan perwujudan dari implementasi setiap kegiatan pada tahapan di atas.

